

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan salah satu niat dan tujuan bagi tiap-tiap negara yang ingin diwujudkan. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kondisi masyarakat yang damai, sehat dan makmur. Kualitas suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan negara itu sendiri, dengan pemenuhan kebutuhan baik secara material, dan jasmani sehingga layak hidup serta mampu menerapkan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial merupakan proiritas utama bagi semua negara di dunia, salah satunya Indonesia. Kesejahteraan juga merupakan cita-cita luhur dari *founding father* kita, yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 11 tahun 2009 menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum dengan tujuan mewujudkan keadilan untuk semua masyarakat Indonesia (Aulya Wardani et al., 2023). Adanya kekayaan sumber daya alam di Indonesia bisa didayagunakan untuk mensejahterakan rakyatnya, selain kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga mempunyai jumlah sumber daya manusia yang besar, bisa dilihat tabel jumlah penduduk Indonesia dibawah ini.

**Tabel 1.1**

#### Jumlah Penduduk Indonesia

Indonesia	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa)		
	2021	2022	2023
	272682,5	275773,8	278696,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (tahun 2023)

Berdasarkan informasi terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS), tabel diatas bahwa populasi di Indonesia saat ini telah menggapai 278,69 juta jiwa di pertengahan pada tahun 2023. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar

1,05% dengan membandingkan tahun yang lalu (*year-on-year/yoy*). Pertengahan pada tahun 2022, memiliki jumlah penduduk mencapai 275,77 juta jiwa di Indonesia.

Kenaikan jumlah penduduk di Indonesia yang tergambar pada data di atas menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan seseorang dapat diukur melalui sejauh mana kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik untuk mereka. Banyaknya masyarakat yang mengalami ketidak penuhi kebutuhan terutama dalam hal pendidikan dan kebutuhan dasar seperti pangan.

Secara umum, kurangnya kebutuhan sering kali timbul pada kalangan keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah atau yang kurang mampu. Hal tersebut terjadi karena mereka mempunyai pendapatan yang tidak tercukupi atau bahkan pendapatan mereka tidak dapat menutupi semua pengeluaran yang mereka miliki disebabkan oleh suatu faktor termasuk masalah kesehatan yang dialami keluarga serta diri sendiri, menciptakan kondisi dimana kebutuhan tidak bisa memadai (Karuniati et al., 2022).

Permasalahan dari masa lampau yang ditempuh oleh negara Indonesia merupakan masalah kemiskinan. Sejak awal periode Indonesia merdeka masalah ini telah menjadi tantangan utama yang terus dihadapi hingga saat ini. Permasalahan kemiskinan memiliki kompleksitas yang tinggi dan bersifat multidimensional yang melibatkan aspek-aspek seperti ekonomi, kesehatan, budaya, sosial, pendidikan, dan berbagai dimensi lainnya. Kemiskinan memiliki potensi penghambat kemajuan Pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah negara sebagai masalah yang krusial. Kemiskinan sangat sering dicirikan oleh tingkat pengangguran yang tinggi dan ketertinggalan. Masyarakat yang memiliki kondisi kurang mampu umumnya lemah dalam berusaha dan terkendala keterbatasan akses terhadap kegiatan ekonomi, sehingga mereka cenderung jauh tertinggal dari masyarakat lain yang memiliki peluang lebih besar (Sugiyana et al., 2022).

Kemiskinan merujuk pada keadaan di mana masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari aspek kebutuhan seperti pangan, tempat

tinggal, pakaian, juga pada pendidikan dan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketidak cukupan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka (Annisya et al., 2023).

Dalam kemiskinan memiliki kondisi serba kekurangan pada materi mencakup keperluan keseharian seperti pangan, pakaian, dan pelayanan publik. Kemiskinan tersebut bisa diartikan sebagai kondisi kurangnya dalam pelayanan publik dan keterbatasan barang. Selain hal itu, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan, termasuk kurangnya akses pendidikan yang berkualitas, ketidaksetaraan dalam pembagian pendapatan, kurangnya peluang ekonomi, masalah kesehatan, konflik, serta faktor-faktor struktural dalam masyarakat dan pemerintah (Nurinda Ibrahim, 2023).

Kota Sukabumi terletak pada provinsi Jawa Barat, Indonesia. Jumlah penduduk kota Sukabumi terakhir tercatat oleh BPS tahun 2022 sebesar 356,804 ribu jiwa, oleh karena itu sebagai pemerintah kota Sukabumi memiliki kewajiban untuk terus berusaha menghilangkan kemiskinan serta memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakatnya agar menjadikan kota Sukabumi menjadi kota yang lebih maju dan Sejahtera dibandingkan kota lainnya.

Dalam penanganan kemiskinan, pemerintah dan semua masyarakat di Kota Sukabumi memandang hal ini bukanlah permasalahan baru untuk dibahas karena telah tertuang pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan terus menekan angka kemiskinan sehingga bisa mensejahterakan masyarakatnya.

**Tabel 1.2**

Jumlah kemiskinan di Kota Sukabumi

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kemiskinan</b>	<b>Presentase</b>
2020	25,42	7,70
2021	27,19	8,25
2022	26,59	8,02
2023	24,96	7,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi (tahun 2023)

Berdasarkan tabel 1.2 bisa tergambar perkembangan jumlah kemiskinan pada Kota Sukabumi dari tahun 2020 – 2021 terjadi peningkatan dan pada tahun 2022-2023 terjadi perubahan dengan jumlah angka kemiskinan yang menurun, dimana jumlah masyarakat miskin tahun 2020 di kota Sukabumi mencapai 25,42 kemiskinan. Kemudian terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 27,19 kemiskinan. Pada tahun 2022 terjadinya penurunan jumlah kemiskinan di Kota Sukabumi sebesar 26,59 kemiskinan, dan penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah menjadi 24,96 kemiskinan.

Wilayah Kota Sukabumi menurut PP No. 3 tahun 1995 memiliki 5 kecamatan dan 33 kelurahan dengan luas 48,423 km<sup>2</sup>. Wilayah administrasi Kota Sukabumi mengalami perubahan, berdasarkan Perda Nomor 15 tahun 2000 menjadi 7 kecamatan, 33 kelurahan, 350 RW, dan 1521 RT. Adapun luas dataran masing-masing kecamatan yaitu Baros (5,58 km<sup>2</sup>), Lembursitu (10,69 km<sup>2</sup>), Cibureum (9,12 km<sup>2</sup>), Citamiang (4,01 km<sup>2</sup>), Warudoyong (7,56 km<sup>2</sup>), Gunungpuyuh (5,15 km<sup>2</sup>), dan Cikole (6,22 km<sup>2</sup>). Kecamatan Cikole merupakan jumlah penduduk terbanyak di Kota Sukabumi yang tercatat pada tahun 2021 sebanyak 62.294, kemudian terbanyak kedua disusul oleh kecamatan Warudoyong yang tercatat pada tahun 2021 sebanyak 60,317 penduduk.

**Tabel 1.3**

Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Sukabumi

Kecamatan	Jumlah kemiskinan dalam (DTKS)	
	2021	2022
Baros	18,201	18,456
Cibureum	21,081	21,474
Cikole	25,847	26,436
Citamiang	26,400	26,057
Gunung Puyuh	17,073	17,576
Lembursitu	20,294	20,783

Warudoyong	31, 851	32,909
<b>Jumlah</b>	<b>160,927</b>	<b>163,721</b>

Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi (tahun 2023)

Tabel 1.3 diketahui jumlah kemiskinan di setiap kecamatan Kota Sukabumi yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021 berjumlah 160,927 jiwa dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 163,721 jiwa. Jumlah kemiskinan terkecil di Kota Sukabumi berada pada kecamatan Gunung Puyuh dengan jumlah 17,073 ribu jiwa pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 17,576 ribu jiwa pada tahun 2022 yang terdaftar pada DTKS, kemudian jumlah kemiskinan terbesar yang terdaftar pada DTKS Kota Sukabumi berada pada kecamatan Warudoyong berjumlah 31,851 ribu jiwa pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 32,909 ribu jiwa pada tahun 2022. Kecamatan Warudoyong merupakan kecamatan yang memiliki masyarakat miskin paling banyak dan meningkat jika dilihat dari data DTKS, maka dari itu pemerintah tentunya memiliki kewajiban untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 1.4**

Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kecamatan Warudoyong

Kecamatan	Jumlah kemiskinan dalam (DTKS)	
	2021	2022
Benteng	6,514	6,666
Dayeuhluhur	9,830	10,425
Nyomplong	2,441	2,382
Sukakarya	9,284	9,350
Warudoyong	3,663	3,363
<b>Jumlah</b>	<b>31,851</b>	<b>32,909</b>

Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi (tahun 2023)

Tabel 1.4 jumlah kemiskinan di setiap kelurahan kecamatan Warudoyong yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021 berjumlah 31,851 jiwa dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 32,909 jiwa. Jumlah kemiskinan terkecil di kecamatan Warudoyong berada pada kelurahan Nyomplong dengan jumlah 2,441 ribu jiwa pada tahun 2021 dan menurun menjadi 2,382 ribu jiwa pada tahun 2022 yang terdaftar pada DTKS, kemudian jumlah kemiskinan terbesar yang terdaftar pada DTKS berada pada kelurahan Dayeuhluhur berjumlah 9,830 ribu jiwa pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 10,425 ribu jiwa pada tahun 2022. Melihat dari data tersebut pemerintah yang memiliki kewajiban untuk terus menangani masalah di kecamatan warudoyong dan terkhusus pada kelurahan Dayeuhluhur dikarenakan memiliki jumlah kemiskinan terbanyak diantara kelurahan yang lainnya.

Masalah kemiskinan yang terjadi, pemerintah membentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu proses menuju sistem jaminan sosial, yang berdiri sejak tahun 2007 oleh pemerintah kepada Kementerian Sosial Indonesia. PKH merupakan program bantuan sosial yang memiliki syarat untuk keluarga dengan penghasilan sedikit atau kurang yang terdaftar dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), ditangani kepada pusat data dan informasi kesejahteraan sosial, dan mengidentifikasi menjadi keluarga penerima manfaat PKH sesuai kriteria (Salsabilah et al., 2023).

Negara lain, mengenal PKH dengan istilah *conditional cash transfer* (CCT) dengan makna bantuan tunai yang memiliki syarat. Program keluarga Harapan memiliki tujuan untuk menunjang rumah tangga sangat miskin, tidak hanya itu program ini juga ditujukan sebagai usaha dalam membangun perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan juga sebagai peran dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Kemensos, 2019).

Proses dalam menjalankan sebagian program pemerintah, dibutuhkan dorongan dari masyarakat setempat. Pelaksanaan kebijakan ataupun program di suatu wilayah harus disosialisasikan dengan baik agar bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, proses implementasi program bisa berlangsung dengan lancar. Program Keluarga Harapan merupakan program

pemerintah yang memfokuskan kepada pengurangan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan. Program bantuan sosial memiliki syarat tertentu, PKH memberikan peluang bagi masyarakat miskin terutama ibu hamil dan anak-anak sehingga bisa mengakses fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar mereka. Dalam pernyataan Kementerian Sosial RI disebutkan bahwa PKH juga ditujukan untuk menjadi pusat keunggulan dalam menanggulangi kemiskinan yang mengintegrasikan beragam program pemberdayaan sosial nasional dan perlindungan (Siswanti et al., 2021).

Permensos No. 1 tahun 2018 memaparkan ketentuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk menjadi penerima manfaat PKH dan memiliki sasaran tiga bidang, yaitu pertama bidang Kesehatan ditujukan pada ibu hamil/menyusui dan balita yang masih berusia mulai 0-6 tahun, kemudian yang kedua bidang Pendidikan ditujukan kepada anak usia dari 6-21 tahun yang belum menempuh wajib belajar selama 12 tahun, dan yang ketiga bidang Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk usia lanjut dari usia 60 tahun, kemudian juga diperuntukan kepada disabilitas dan diutamakan disabilitas berat (Sari Shinta et al., 2022).

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 terdapat ketentuan pada pasal 49 tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dimana terdapat peran pendamping sebagai tokoh yang berharga untuk mencapai tujuan Program Keluarga Harapan. Pendamping Program Keluarga Harapan diidentifikasi sebagai sumber daya manusia untuk direkrut dan dipekerjakan sesuai kontrak yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial menjadi pelaksana pendampingan. Kesuksesan pelaksanaan Program Keluarga Harapan sangat berpengaruh di tangan peran pendamping (Linggar Septiyanti et al., 2022).

Tugas pokok pendamping PKH adalah menjalankan semua proses pengimplementasian Program Keluarga Harapan dengan mencakup dari pertemuan awal, memvalidasi calon penerima manfaat, pembaruan data, melakukan verifikasi perjanjian kehadiran pada layanan kesehatan dan pendidikan, mengawasi distribusi bantuan, penyelenggaraan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga), menangani pengaduan, menyusun laporan, dan

menyelesaikan masalah yang muncul selama pelaksanaan PKH di lapangan (Linggar Septiyanti et al., 2022).

Pemerintah Kota Sukabumi melaksanakan Program Keluarga Harapan tertera dalam Perwali SK No.149 tahun 2021 tentang pembentukan koordinasi teknis PKH Kota Sukabumi, didalamnya menyatakan melakukan fasilitasi pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja PKH. Kemudian melakukan pembinaan administrasi dalam kegiatan koordinasi, pemantauan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, melaksanakan sosialisasi dan pemantauan serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Wali Kota Sukabumi.

**Tabel 1.5**  
Jumlah Penerima PKH Kota Sukabumi

Kecamatan	Jumlah dan Tahun Penerima PKH	
	2021	2022
Baros	1,280	1,169
Cibeureum	1,731	1,398
Cikole	1,894	1,895
Citamiang	1,573	1,454
Gunung Puyuh	1,277	1,241
Lembursitu	1,495	1,515
Warudoyong	2,408	2,408
<b>Jumlah</b>	<b>11,640</b>	<b>11,080</b>

Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi (tahun 2023)

Melihat tabel 1.5 menunjukan bahwa pada tahun 2021 penerima PKH di kota Sukabumi sebesar 11,640 ribu jiwa namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 11,080 ribu jiwa penerima PKH. Kecamatan Gunung puyuh merupakan penerima PKH paling sedikit dengan jumlah 1,277 pada tahun 2021 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 1,241 ribu jiwa, dan penerima PKH paling banyak tentu

saja pada kecamatan Warudoyong pada tahun 2021 dengan jumlah 2,408 dan pada 2022 penerima PKH tetap dengan jumlah 2,408 ribu jiwa.

Melihat jumlah kemiskinan yang paling banyak di kota Sukabumi berada pada kecamatan Warudoyong dengan jumlah 32,909 ribu jiwa yang terdaftar pada DTKS dan menerima bantuan PKH paling banyak dengan jumlah 2,408 ribu jiwa. Dalam implementasinya, Program Keluarga Harapan diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 yang mencakup berbagai prosedur menjalankan PKH dimulai dari tahap perancangan sampai tahap evaluasi kebijakan. Sebelum menerapkan suatu kebijakan tentu memerlukan berbagai persiapan, diawali dari perencanaan, pembentukan lembaga, dan menetapkan sasaran atau calon peserta PKH (Oktarina et al., 2022).

**Tabel 1.6**  
Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Warudoyong

Kelurahan	Jumlah dan Tahun Penerima PKH	
	2021	2022
Benteng	443	429
Dayeuhluhur	807	851
Nyomplong	106	102
Sukakarya	823	759
Warudoyong	229	267
<b>Jumlah</b>	<b>2,408</b>	<b>2,408</b>

Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi (2023)

Melihat tabel 1.6 kecamatan warudoyong memiliki 5 kelurahan yang menerima bantuan PKH, kelurahan Benteng pada tahun 2021 menerima 443 jiwa dan 2022 menurun menjadi 429 jiwa, kelurahan Dayeuhluhur pada tahun 2021 menerima 807 jiwa dan 2022 meningkat menjadi 851 jiwa, kelurahan Nyomplong pada tahun 2021 sebesar 106 jiwa dan 2022 menurun menjadi 102 jiwa, kelurahan Sukakarya pada tahun 2021 menerima 823 jiwa dan 2022 menurun menjadi 759

jiwa, kelurahan Warudoyong pada tahun 2021 menerima 229 jiwa dan tahun 2022 meningkat menjadi 267 jiwa.

Melihat dari DTKS pada kecamatan Warudoyong sebelumnya dari 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan kemiskinan, namun pada penerima bantuan PKH tahun 2021 hingga 2022 memiliki bantuan PKH dengan jumlah tetap tidak meningkat, melihat dari data DTKS jumlah kemiskinan kecamatan Warudoyong merupakan kecamatan yang paling banyak masyarakat miskin diantara kecamatan yang ada di kota Sukabumi, dan melihat dari data DTKS juga Kelurahan Dayeuhluhur menjadi penerima bantuan PKH terbanyak diantara kelurahan lainnya di kecamatan Warudoyong yang disebabkan paling tingginya angka kemiskinan dan meningkat lebih banyak. Melihat permasalahan yang ada bisa disebut bahwa bantuan PKH di kecamatan Warudoyong ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam.

Administrasi Publik hadir dengan permasalahan yang terjadi sebagai ilmu yang memiliki kemampuan mengatasi permasalahan publik yang memiliki sifat kompleks. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah melibatkan aspek multi-sektoral yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Keberhasilan Program Keluarga Harapan dapat dikatakan berhasil ketika evaluasi kebijakan menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan parameter-parameter yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan kebijakan. Kebijakan program yang sudah dilakukan perlu dinilai dengan melakukan evaluasi sehingga hasil yang ingin dicapai dapat diketahui, apakah kebijakan program yang dijalankan memiliki hasil sesuai dengan yang diharapkan atau malah sebaliknya tidak sesuai dan berbelok dari apa yang diharapkan, (Hadirianto et al., 2023). Berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang ada pada Program Keluarga Harapan di Kecamatan Warudoyong membutuhkan tindakan evaluasi. Tujuan utama evaluasi pada dasarnya merupakan sebagai memberikan pengukuran mengenai nilai apasaja dalam proses pengevaluasian, apapun hasilnya evaluasi kebijakan menjawab keingintahuan evaluator atau peneliti tentang aktivitas suatu kebijakan (Agustino, 2023). Agar bisa membantu proses penelitian ini peneliti menggunakan teori evaluasi program CIPP menurut Stufflebeam (2002) yang terdapat empat variabel yaitu: *context*,

*input, process, product*. Oleh karena itu, begitu penting dalam melakukan Evaluasi Program keluarga Harapan sehingga bisa berhasil sesuai dengan tujuan.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan Pada Masyarakat Miskin Di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kemiskinan di kecamatan Warudoyong.
2. Jumlah bantuan PKH yang diberikan kepada kecamatan Warudoyong tetap walaupun jumlah kemiskinan meningkat.
3. Kelurahan Dayeuhluhur menjadi penerima bantuan PKH terbanyak diantara kelurahan lainnya di kecamatan Warudoyong yang disebabkan paling tingginya angka kemiskinan dan meningkat lebih signifikan.

## **C. Rumusan masalah**

Penjelasan sebelumnya sudah diuraikan di bagian latar belakang penelitian, sehingga membuat adanya rumusan masalah penelitian yang sudah peneliti rumuskan, sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana konteks Program Keluarga Harapan pada masyarakat miskin di Kecamatan Warudoyong?
2. Bagaimana masukan Program Keluarga Harapan pada masyarakat miskin di Kecamatan Warudoyong?
3. Bagaimana proses Program Keluarga Harapan pada masyarakat miskin di Kecamatan Warudoyong?
4. Bagaimana hasil Program Keluarga Harapan pada masyarakat miskin di Kecamatan Warudoyong?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, dilakukannya penelitian ini dengan tujuan sebagai mengidentifikasi:

1. Untuk mengetahui konteks Program Keluarga Harapan pada masyarakat miskin di Kecamatan Warudoyong.
2. Untuk mengetahui masukan Program Keluarga Harapan pada masyarakat miskin di Kecamatan Warudoyong.
3. Untuk mengetahui proses Program Keluarga Harapan pada masyarakat miskin di Kecamatan Warudoyong.
4. Untuk mengetahui hasil Program Keluarga Harapan pada masyarakat miskin di Kecamatan Warudoyong.

#### **E. Manfaat penelitian**

Peneliti berharap bahwa penelitian yang dilakukan ini bisa memberikan manfaat dan dampak baik Secara teoritis ataupun secara praktis bagi siapapun yang membutuhkan

1. Secara teoritis
  - a. Peneliti memiliki harapan penelitian ini bisa berguna sebagai mengembangkan keilmuan dan pemahaman mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan dikalangan masyarakat kurang mampu di kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Tujuan penulis adalah memberikan kontribusi berupa ide dan informasi terbaru yang dapat mengembangkan keilmuan, Khususnya dalam konteks pembangunan serta pengembangan Administrasi Publik
  - b. Berpartisipasi dalam pengembangan dan melatih kemampuan untuk berpikir secara ilmiah dan sistematis. Penyusunan penelitian ini menggunakan banyak literatur dengan wacana baru dengan maksud memperluas kepustakaan pendidikan.
2. Secara praktis
  - a. Penulis memiliki harapan bahwa hasil dari penelitian ini bisa memberikan data dan informasi yang memberikan manfaat luas,

khususnya untuk masyarakat umum. Selain itu, harapan lainnya adalah penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan permasalahan terkait program tersebut.

- b. Diharapkan penelitian ini bisa membantu pemerintah maupun instansi terkait untuk mengambil keputusan dan sebuah evaluasi Program Keluarga Harapan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi kritik konstruktif agar menjalankan Program Keluarga Harapan untuk mengurangi kemiskinan.
- c. Bagi penulis berharap bahwa penelitian ini bisa memperoleh wawasan, pengalaman dan pengetahuan yang komprehensif, terutama yang berkaitan dengan Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Warudoyong.

#### **F. Kerangka pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan suatu alur logis dalam bentuk diagram yang dimaksudkan untuk menjelaskan secara keseluruhan inti atau garis besar penelitian tersebut. Penulis melakukan proses penelitian dengan melihat fenomena pemerintah memberikan bantuan berupa Program Keluarga Harapan pada masyarakat miskin. Kecamatan Warudoyong sebelumnya dari 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan kemiskinan, namun pada penerima bantuan PKH tahun 2021 hingga 2022 memiliki bantuan PKH dengan jumlah tetap tidak meningkat, melihat dari data DTKS jumlah kemiskinan kecamatan Warudoyong merupakan kecamatan yang paling banyak masyarakat miskin diantara kecamatan yang ada di kota Sukabumi, dan melihat dari data DTKS juga kelurahan Dayeuhluhur menjadi penerima bantuan PKH terbanyak diantara kelurahan lainnya di kecamatan Warudoyong yang disebabkan paling tingginya angka kemiskinan dan meningkat lebih banyak. Pemerintah sebagai organisasi publik membutuhkan pengevaluasian sehingga pada pelaksanaan kebijakan bisa mencapai tujuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur Program Keluarga Harapan apakah sudah sesuai yang dilakukan Kecamatan Warudoyong dalam upaya menekan angka kemiskinan.

Evaluasi menjadi suatu kebutuhan untuk menentukan apakah program tersebut memerlukan pembenahan atau sudah bisa disebut berhasil melewati kajian dan pemahaman terhadap peristiwa pasca-pelaksanaan suatu program. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori model evaluasi program CIPP yang dikembangkan Daniel L. Stufflebeam dari tahun 1966. Model evaluasi CIPP dapat dikatakan lebih komprehensif karena tidak hanya fokus pada hasil tetapi juga fokus terhadap konteks, masukan, proses, dan hasil. Model ini, merupakan salah satu model evaluasi yang sering digunakan dalam evaluasi program. Model evaluasi CIPP adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi suatu sistem atau program (Heriansyah, 2020). Maka dari itu, teori evaluasi program CIPP ini dianggap paling sesuai untuk mengkaji objek penelitian yaitu evaluasi program keluarga harapan pada masyarakat miskin di kecamatan Warudoyong. Terdapat empat hal yang dapat menjadi suatu ukuran pada evaluasi program menurut Stufflebeam dalam (Suharsimi Arikunto, 2010) yakni sebagai berikut:

a) Konteks (*context*)

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan program (Suharsimi Arikunto, 2010).

b) Masukan (*input*)

Evaluasi masukan tahap yang berpengaruh pada proses, masukan memberikan keputusan, sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menentukan rencana yang matang, membuat strategi yang akan dilakukan dan memperhatikan prosedur kerja dalam mencapainya (Suharsimi Arikunto, 2010).

c) Proses (*process*)

Evaluasi proses dalam model CIPP ini menunjukkan pada (what) yaitu apa kegiatan yang dilaksanakan pada program, (who) siapa orang ditunjuk untuk penanggung jawab program, (when) kapan kegiatan telah usai. Model CIPP didalamnya, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program apakah sudah terlaksana sesuai dengan rencana.(Suharsimi Arikunto, 2010).

d) Hasil (*product*)

Evaluasi hasil ini digunakan sebagai menentukan keputusan yang akan dilakukan selanjutnya. Evaluasi diarahkan pada keseluruhan dampak dari suatu program terhadap masyarakat penerima program (Suharsimi Arikunto, 2010).

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dilakukan, dan kajian teori yang telah diuraikan maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

